

JALAN KELUAR DARI POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA Studi Antropologi-Struktural

ATMARI
STAI al Azhar Menganti Gresik
atmarinj@gmail.com

ABSTRAK

Abstract: Tulisan ini akan merespon pelbagai fenomena yang terjadi belakangan terkait dengan model politik identitas yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana jalan keluar yang ditawarkan Islam untuk mengatasi fenomena tersebut. Secara pendekatan tulisan ini akan didekati menggunakan paradigma antropologi structural, yang berarti, proses pengkajian berdasarkan pada laman symbol-simbol yang digunakan untuk meningkatkan eskalasi politik identitas tersebut. Pada kesimpulannya, tulisan ini menemukan model politik bernama politik kebijaksanaan. Sebuah politik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad di dalam membangun sistem nilai dan kenegaraan yang ada di Kota Madinah waktu itu. Nabi Muhammad menggunakan piagam madinah sebagai simpul dan symbol persatuan dan kesatuan yang disepakati bersama. Sama halnya dengan negara Indonesia yang meyakini sistem ideology Pancasila sebagai nilai tak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari.

Keyword; Politik Identitas dan Antropologi Struktural

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dipertontonkan model kontestasi politik baru, bernama politik identitas. Salah satu, yang paling sensitif diperbincangkan, adalah isu agama. Dan, penulis masih meyakini, *living religious issues* ini masih akan dijadikan stratgi kontestasi politik di masa yang akan. Alasan paling sederhana ialah agama bisa “membuntukan” rasiolitas-etis yang dipegang teguh oleh para pemilih untuk menentukan siapa pemimpin atau wakil yang ideal bagi mereka. Agama pula yang akan “mematikan” fakta-fakta meritokrasi politik yang dijalankan oleh seorang pemimpin dikala mereka membangun visi, misi, dan program yang akan/sudah dikerjakannya.

Sebagai sebuah contoh, Basuki Tjahja Purnama (BTP), Anis Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo adalah sosok politisi yang terus menerus di-*framing* oleh lawan politiknya menggunakan pendekatan keagamaan. BTP – sampai kapanpun - sudah tidak bisa menjadi pejabat publik dengan santai, karena ia dilabeli sebagai penista agama. Anis Baswedan pun demikian, ia sudah tidak bisa mengaku nasionalis murni, karena pernah menjadi “alat perlawanan” terhadap minoritas. Bahkan, penulis yakin nantinya, ia pun akan dilawan menggunakan isu bukan asli pribumi. Ridwan dan Ganjar pun demikian, meski dianggap dekat, dan memiliki wakil dari kalangan NU (baca; kelompok moderat Islam), tapi secara personal keduanya dianggap bukan sebagai muslim yang ta’at.

Dialektical-tension ini, menjadikan kajian antropologis truktural menjadi cukup menarik digunakan untuk melihat, sejauh mana politik identitas ini akan terus



berkelindan pada politik di Indonesia. Bagaimana jalan keluar yang ditawarkan agar masyarakat Indonesia memiliki ke-khas-an tersendiri dalam berpolitik. Walaupun, pada praktiknya, akan menggunakan isu-isu primordialisme tersebut sebagai strategi politik yang tidak terelakkan. Maka dari itu, tulisan ini akan penulis bagi menjadi beberapa poin penting untuk melihat kembali apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia belakangan.

SUMBER DAN WUJUD POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA

Pasca reformasi dibuka, identitas keberagamaan memang tidak lagi menjadi isu akhir sebuah kepemimpinan, melainkan sebaliknya, politik identitas keberagamaan selalu dibangun sebagai wujud yang hidup untuk melawan legitamasi pemerintah. Di era Abdurrahman Wahid (Gus Dur), konsolidasi nasional memang cenderung bisa diselesaikan untuk membangun stabilitas nasional. Namun, tragedy terorisme global 9/11 di Amerika Serikat, juga berdampak di era kepemimpinan Megawati Soekarno Puteri. Umat Islam, pada satu sisi yang dituduh sebagai kelompok terror, menjadi 'berang' terhadap stigmatisasi tersebut. Mereka berkumpul, berserikat, serta membangun kekuasaan untuk melakukan hal serupa di Indonesia. Pasca Megawati pun, SBY hingga Joko Widodo hari ini, *living conflict* (Islamisme dan nasionalisme) masih juga dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia, sehingga selalu menunjukkan kegagapan kebijakan serta kekhawatiran kalahnya identitas-autentik masyarakat Islam Indonesia (baca; plural dan toleran) daripada kelompok intorelan dan cenderung memaksakan kehendaknya melalui jalur anarkhis. Dalam merespon ini, SBY-Jokowi pun meneruskan kampanye untuk melawan kelompok Islam tersebut, apakah itu melalui program antisipatif serta represif.

Tentunya, tidak sekedar pemerintah yang mengkhawatirkan model kontestasi politik identitas ini. Para akademisi, tokoh agama, dan para administrator daerah juga bimbang jika hal tersebut terus menerus dikritisasi sebagai sikap masyarakat Indonesia. Pasalnya, kontestasi politik identitas berbasis keberagamaan ini pasti berdampak pada stabilitas kerukunan umat beragama dalam skala nasional, dan bisa jadi di tingkatan lokal. Lebih-lebih di daerah yang distigmatisasi sebagai daerah rawan konflik seperti di Ambon, Papua, dan daerah-daerah lainnya. Dari kalangan akademisi, Syafi'i Maarif sempat mengungkapkan kekhawatiran tersebut pada tahun 2009 yang lalu dikala memberikan pidato ilmiah di Acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture di Aula Universitas Paramadina. Bagi Buya Syafi'i politik identitas sejatinya tidak akan merusak apabila penghayatan terhadap identitas universal ke-Indonesiaan tidak diletakkan pada ruang pragmatisme dan di awang-awang. Nilai identitas universal dikhayati sebagai sikap kolektif yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, akan sangat berbahaya apabila pemaksaan atasnama identitas tertentu dibiarkan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab menjaga dan memelihara universalitas identitas-plural yang ada di Indonesia.¹

Tidak sekedar di tahun 2009, pada proses Pilkada Jakarta Tahun 2016 kemaren, Buyah Syafi'i pun tidak henti-henti memperingatkan para politisi agar tidak memainkan

¹Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta; Democracy Project, 2012), hal 18



politik identitas berbasis agama di ruang publik. Sebab, hal itu sangat berbaya. Lebih-lebih karena hanya untuk kepentingan kekuasaan sesaat yakni kontestasi kepemimpinan di kancah ibukota. Tapi tampaknya, himbuan tersebut tidak diindahkan oleh para politisi yang sedang berkontestasi. Sehingga, konflik keberagamaan hingga hari sekarang masih dirasakan oleh masyarakat Indoensia, dan ditengarai akan terus menyebar ke daerah-daerah yang lain.² Pun demikian halnya dengan ketua organisasi moderat di Indonesia (baca; Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah), mereka berharap kontestasi keberagamaan dan sikap nasionalisme di Indonesia secepat mungkin dihilangkan. Pertarungan politik, secara proporsional, semestinya memperdebatankan dan mengkampanyekan apa program yang akan dijalankan untuk berpihak kepada masyarakat, bukan membawa agama secara sepihak sebagai strategi politik mereka, sehingga mengerus emosi dari kelompok yang diam (*silent-majority*) di Indonesia.³

KELAHIRAN KEMBALI POLITIK IDENTITAS; GLOBALISM, LOCALISM, AND RELIGIOSITY

Semua orang pasti bersepakat jika setiap negara memiliki dimensi kesejarahan politik identitas sendiri-sendiri, dan selalu menemukan momentum politik secara berbeda-beda. Di Amerika Serikat hari ini misalnya, ekspansi besar-besaran yang dilancarkan untuk mengerus kekayaan alam di negara Islam menjadikan Amerika Serikat sebagai *common enemies* dari kelompok radikal yang ada di Timur Tengah. Seruan *Jihad* (baca; perang) melawan kekejaman Amerika Serikat terus dikampanyekan. Malahan, tidak jarang umat Islam yang ada di Amerika Serikat pun bertindak tanpa komando untuk melawan ketidak berpihakan pemerintah adikuasa itu terhadap umat Islam di beberapa pilahan dunia. Maka tidak salah, jika beberapa tahun terakhir, setidaknya dikala pemerintahan M. H. Obama, pemerintah Amerika Serikat cenderung kompromistik akan gerakan Islam. Obama mengatakan bahwa Islam dan negara yang mayoritas Islam merupakan mitra bersama untuk menjaga kedamaian dunia.⁴ Obama tidak memilih jalur resisten dan distingtif terhadap mana orang Amerika asli dan kelompok pendatang di negara Paman Syam tersebut.

Tapi tidak dengan Donald Trump. Politisi Partai Republik ini menganggap bahwa Islam adalah ancaman dan harus dilawan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dia seakan-akan ingin melanjutkan tradisi para pemimpin dari Partai Republik untuk melakukan politik proteksionisme terhadap kelompok kulit putih (ras paling dominan di Amerika Serikat), dan ketidaksukaan orang Amerika Serikat kepada orang Islam (Islamophobia). Sehingga, dalam setiap kampanyenya, dia menggunakan diksi berbeda dibandingkan Hillary Clinton, terkait sikap kepada kelompok Islam. Tidak jarang dia mengatakan akan melawan teroris muslim dan melindungi masyarakat Amerika Serikat dengan melakukan pelarangan imigran Islam masuk ke Amerika Serikat.

² Lihat liputan "Politik Identitas Masih Dikhawatirkan Menjelang Tahun Politik" diakses melalui jogja.tribunnews.com pada 04 Januari 2018.

³ Lihat liputan "ini problem menguatnya politik identitas keagamaan di Indonesia" diakses melalui nu.or.id pada 04 Januari 2018

⁴ Pandangan-pandangan para pemimpin dunia terkait identitas keislaman di negara-negara Barat memang cukup beragam. Penjelasan lebih lengkap Lihat: J. D. Esposito, *the future of Islam*, (New York, Routledge, 2009), 12



Donald Trump juga menampakkan keberpihakannya terhadap negara-negara yang memilih ada jarak terhadap kelompok-kelompok Islamist di beberapa negara eropa. Implikasi dari kebijakan Donald Trump ini akhirnya menumbuhkan ketidaksukaan masyarakat Muslim kepada dirinya, termasuk pada orang-orang Amerika Serikat secara luas.

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat, problem serupa juga menghantui beberapa negara Eropa. Seperti Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda. Negara-negara ini merupakan sekutu Amerika Serikat untuk menjadikan negara Timur Tengah dan Asia sebagai *Land of War* untuk kepentingan politik internasional mereka. Maka dari itu, teror – berbasis agama Islam – di negara tersebut tidak kunjung selesai dan masih terus tumbuh subur sebagai proses perlawanan terhadap perlakuan kurang adil dari negara maju tersebut. Dampaknya, negara-negara Eropa juga melakukan proteksi yang sangat massif atas tumbuh kembang gerakan Islam radikal di negara masing-masing. Kondisi sedikit berbeda apabila nuansa politik identitas ini disandingkan pada beberapa negara Eropa Timur, yang *notabene* memiliki bergulatan panjang dengan kelompok Islam. Mereka lebih memilih berelaborasi secara produktif dibandingkan menggunakan cara-cara konfrontatif sebagaimana negara yang sudah penuli sebutkan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan kondisi di negara-negara Asia dan Afrika yang Islam atau etnisitas keberagamaannya lebih homogen?

Dalam pengamatan penulis, bagi negara yang berideologi Islam, pastinya, mereka menganut identitas tinggal berbasis agama. Namun sebaliknya, negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang menganut sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya, mereka meletakkan kecintaan akan negara (nasionalisme) di atas nilai-nilai keagamaan mereka. Oleh sebab itu, ada beberapa negara Islam (atau setidaknya mayoritas masyarakatnya beragama Islam) menjalankan sistem politik identitas lokal mereka. Malahan, sebagian dari negara tersebut, ‘memusuhi’ kelompok radikal dan transnasional yang dianggap mengancam keutuhan dan kesatuan negara yang dibentuk dan diperjuangkan oleh masyarakat di negara tersebut. Sebut saja Malaysia, Brunei Darussalam, India dan beberapa negara lain, dimana Islam menjadi bagian terpenting akan pembangunan identitas masyarakat lokal mereka. Dengan demikian tampak sekali bahwa politik identitas yang mereka kampanyekan adalah model politik identitas nasionalisme, bukan berpihak pada segmentasi dan segregasi kebudayaan masyarakat tertentu di teritori mereka.

Bagaimanakah dengan di Indonesia? Akankah politik identitas kebhinnekaan, multikulturalisme, dan multi-religious sudah dihayati sebagaimana mana mestinya? Kalau melihat uraian di atas, maka semuanya sudah sangat bergantung pada corak dan keberpihakan kepemimpinan nasional yang ada. Dalam pandangan penulis, bisa dikatakan politik identitas nasional sudah mulai direduksi pada reformasi dan demokratisasi liberal dijalankan di Indonesia. Pandangan ini penulis rujukkan kepada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan kembalinya corak pemikiran Islam konservatif di Indonesia, politik berbasis agama yang dikontestasikan di tingkat nasional dan global, seakan-akan meniru keberhasilan politik keberpihakan di era global hari ini, sesuai dengan fakta kemenangan kelompok-kelompok Islam di masyarakat nasionalis seperti, Erdogan di Turki dan kelompok politik konservatif seper Donald Trump di Amerika Serikat. Potret serupa bisa dilihat di Jakarta



disaat lawan politiknya berasal dari *two-conflict victims of Indonesian people* yakni; orang China dan Kristen) sebagaimana diungkapkan oleh Kees van Dijk dan Nico J.G Katein.⁵

Sebelum melihat strategi purba (baca; politik identitas) ini digunakan lebih jauh di Indonesia, ada baiknya penulis paparkan dulu bagaimana kajian politik identitas ini diterjemahkan secara teoritik. Jonathan Freidman menyebutkan bahwa politik identitas bisa didefinisikan berdasarkan kontestasi perilaku, kebijakan, dan keberpihakan politik terhadap kelompok masyarakat yang berkembang dari masa ke masa. Politik identitas bisa hilang di lingkungan masyarakat yang rasa dan paham pluralitasnya tinggi, atau sangat bermanfaat apabila masyarakat seakan-akan menemukan kembali identitas lamanya menjadi kekuatan baru dalam menentukan arus masa depan.⁶ Maka dari itu, dia melanjutkan, bahwa tugas seorang antropolog, harus mampu menterjemahkan kedua relasi dalam perpektif historis, fakta kronologis yang ada di lapangan, hingga dinamika kekinian untuk melihat masa depan. Dia mencontohkan bagaimana politik identitas digunakan Martin Luther King, untuk memenangkan pertarungan politik di Amerika, kemudian ditiru kembali dalam beberapa kontestasi politik di Amerika Serikat,⁷ termasuk Donald Trump yang sudah penulis sebutkan sebelumnya.

Berdasarkan pendefinisian ini, maka politik identitas seperti sebuah ruang yang terpendam dan bisa muncul kapan saja, kemudian mengancam identitas plural dan multikulturalisme sebuah negara. Sebab, politik identitas selalu akan membentuk konflik disintegrasi mayoritas dan tirani terhadap minoritas. Untuk menjamin pluralitas dan multikulturalitas, sebuah negara biasanya, mebuat aturan-aturan tersendiri agar mampu menjaga harmoni perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kendati sudah dipagari melalui aturan dan sistem nilai interaksi di dalam masyarakat, dinamika dan perubahan arus berfikir masyarakat tidak mudah untuk dipasung, lebih-lebih apabila hal tersebut berhubungan dengan dogma dan ideologi (keyakinan) seseorang. Secara teoritik, selain sudah diungkapkan sebelumnya, tampaknya Syafi'i Ma'arif juga membatasi kajian politik identitas di Indonesia lebih pada aspek agama, etnisitas, dan ideologi saja. Baginya, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan budaya, suku, dan ikatan-ikatan cultural lainnya, pada satu sisi, sudah tertolong oleh *i'tikad* kesatuan dan persatuan yang diperjuangkan bersama dikala penjajahan dulu.⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Husniyatus Salamah, dia mengatakan bahwa hanya ada dua *living conflict* di Indonesia, yakni terkait faham ideologis agama dan nasionalisme serta konflik etnisitas penguasa ekonomi di Indonesia. Sedangkan persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan tribalisme, komunalisme, perbedaan budaya, dan bahasa sudah selesai serta menjadi *values of Indonesian citizenship*. Bagi dia politik identitas – dalam bentuk proteksi terhadap budaya universal yang ada di Indonesia – merupakan hal yang lumrah. Menjadi persoalan apabila identitas yang dijadikan alat kekuasaan hanya berbentuk parsial atau berasal dari kelompok tertentu

⁵ JajaBurhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam in Indonesia; Contrasting Image and Interpretations* (Amsterdam; Amsterdam University Press, 2013), 15

⁶ Jonathan Freidman "The Past in The Future; istory and Politics of Identity" dalam *Journal of American Anthropologist* Vol 94 Issue 4 Tahun 1992, 837

⁷ *Ibid*, 840

⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, ...20*



saja, tidak menyeluruh. Dia memberikan contoh bagaimana orang-orang Amerika Serikat berbangga diri menyebut ‘Saya orang Amerika’. Orang yang memiliki pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan toleran terhadap perbedaan yang ada di negara mereka. Fenomena seperti ini juga sempat diproklamerkan oleh pemuda Indonesia pada periode kemerdekaan, mereka menyebut komunitas beragama itu sebagai orang Indonesia, bukan dari daerah tertentu atau ras tertentu.⁹

Penulis pun bersepakat terhadap pandangan Syafii Maarif terkait bagaimana perjalanan politik identitas ini terjadi di era demokrasi dan reformasi. Varian-varian politik identitas memang sudah tidak bisa dibaca dalam skala yang makro (relasi kuasa dan masyarakat), melainkan juga dialektika dan interaksi yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Bahkan, dengan kondisi Indonesia yang sangat multi budaya, agama, ras, dan keyakinan kebudayaan, dinamikanya akan lebih pelik dibandingkan Amerika dan beberapa negara eropa. Dalam pembacaan penulis, pola politik identitas di negara maju tersebut hanya ada pada dua komponen praktis; orang asli dan imigran. Sehingga akulturasi bisa dilaksanakan menggunakan cara pemaksaan terhadap para pendatang/imigran. Di Indonesia, keragaman itu sudah terlahir dan terpisah antara satu daerah dengan daerah lainnya, yang secara territorial melebihi batasan *space* yang ada di Amerika dan Eropa.

Oleh karenanya, secara politik, seorang penguasa idealnya selalu berfikir tentang politik pluralisme dan multikulturalisme. Pemimpin di Indonesia, pada level apapun, mesti berkesedaran kalau Indonesia terdiri dari banyak budaya dan model keyakinan manusia yang sulit diseragamkan. Penulis tidak perlu menyebutkan berapa banyak suku, sistem budaya, bahasa, dan agama yang ada dan diyakini oleh masyarakat. Hal ini akan menambah rumit bagaimana pemerintah harus berkontribusi mengharmonikan budaya-budaya yang ada tersebut. Yang pasti, pemerintah harus berada di atas semua golongan yang berkembang dan harus berusaha tidak mengusik keberagaman tersebut, semisal seperti yang kesalahan narasi pidato Anies-Sandi di Pilkada Jakarta. Sebab apa, kesalahan-kesalahan terhadap pilihan diksi dan strategi politik akan lebih banyak menguntungkan mereka yang secara ‘senyap’ memiliki hasrat politik berbeda daripada yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa di Indonesia.

Penulis ingin menambahkan fenomena-fenomena yang terjadi pasca reformasi. Pada tahun 2013 yang lalu, Martin Van Bruinessen dkk menulis buku tentang “*Islamic Conservative Turn*” (kembali gerakan Islam konservatif di Indonesia). Pada buku ini dipaparkan bagaimana Islam kembali menjadi ruang kontestasi politik, diskursus publik yang mempengaruhi persepsi-persepsi masyarakat Islam, serta bagaimana pula politik keberpihakan pada identitas tertentu, tidak banyak banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia.¹⁰ Ulasan di dalam buku juga cukup menarik untuk membaca ulang apa yang diungkapkan oleh para peneliti terdahulu terkait kekhawatiran menguatnya agama di ruang publik. Sedikitnya buku ini memaparkan empat kerangka penting; *pertama*,

⁹ Husniyatus Salamah “Politik of Citizenship; Shape of identities, education and critical media literacy” Paper Seminar Internasional Pendidikan Islam di UM Malang Pada Desember 2016; (tidak dipublikasikan).

¹⁰ Ulasan singkat terkait buku Martin Van Bruinessen dkk bisa dilihat dalam Din Wahid “Kembali Konservatisme Islam Indonesia” dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol 21 No 2 Tahun 2014, 376



pembacaan terhadap majelis ulama' Indonesia dalam konteks otoritas keagamaan. Harus diakui memang, ruang konflik dan politisasi agama cenderung menggunakan legitimasi MUI. Ada banyak contoh yang bisa dijadikan postulasi anggapan ini, semisal Pilkada Jakarta, pengusuran Masjid Ahmadiyah, dan pelarangan pendirian rumah ibadah di beberapa daerah. *Kedua* pembacaan terhadap kaderisasi dan proyeksi gerakan ke depan untuk membangun negara Islam. *Ketiga*, transnasional linkage gerakan-gerakan radikal baru di Indonesia. Terakhir, memudarnya peran kelompok moderat di dalam ruang publik.¹¹ Pada bagian ini, Azra memberikan beberapa catatan khusus, misalnya; adanya gap pengetahuan yang dilakukan di ruang akademik terhadap pemahaman yang disebarkan oleh para dai di lingkungan masyarakat.¹²

Pada intinya, apapun konsepsi tentang bagaimana politik identitas itu dijalankan, baik dimulai dari perspektif relasi kuasa dan kepentingan mayoritas, dinamika dan interaksi yang terjadi melalui kelompok-kelompok sosial-kemasyarakatan, atau bahkan, muncul sendiri akibat kepentingan transnasionalisme dan partai politik tertentu, kesemuanya harus bisa diantisipasi melalui politik Islam multi kulturalisme dan pluralisme. Sebuah model politik yang bisa menyelamatkan kelompok minoritas di daerah mayoritas di Indonesia, demikian sebaliknya, masyarakat minoritas non-muslim tidak merasa terancam di lingkungan masyarakat muslim. Hal ini, kalau boleh penulis menilai, merupakan sebuah corak politik yang dilakukan oleh Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bagi penulis, dia bisa berdiri di atas semua golongan serta menjalankan koridor politik substantif yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, ideology Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia pula yang membuka kran demokrasi sebebas-bebasnya, dan membiarkan masyarakat mempelajari arah dan kecenderungan sikap demokratisnya di Indonesia. Dan tugas penerusnya ialah melakukan revisi-revisi bagi kebijakan politik yang tidak berpihak pada identitas multi agama dan budaya yang ada di Indonesia.

¹¹ Peter Mandaville mengusulkan tiga kerangka teori untuk membaca transnasionalisme Islam. *Pertama*, menggunakan paradigma *travelling theory*. Teori ini mengindikasikan bahwa sebuah gagasan tidak bisa diisolasi dalam sebuah negara tertentu, melainkan bisa menyebar secara trans-locality. *Kedua*, teori *hybridity*, sebuah teori tentang pasca-kolonialisme tidak ada lagi authentic identity, semua berbaur dalam sebuah konsepsi intercultural dan multicultural. Melalui paradigma ini, maka Islam bisa menjadi bagian terpenting untuk menghilangkan identitas lokal, baik dalam proses segregasi ataupun akulturasi kebudayaan. *Ketiga*, Islam dan Diaspora (kelompok non-pribumi). Teori tentang bagaimana pengaruh pendatang bisa dilihat di beberapa negara Eropa dan Amerika dimana dua negara ini menjadi tujuan utama para immigrant Muslim ataupun para kapitalis muslim. Jadi, pada kesimpulannya, transnasionalisme Islam memang bisa berbentuk ide ataupun gagasan tokoh Islam, kelompok masyarakat pendatang, dan Islamic-international organization. (Lihat; Peter Mandaville, *Transnational Muslim Politics; Re-Imaging The Umma* (London: Routledge, 2001), h. 83. Dalam konteks ke Indonesia, terminology transnasionalisme diperkenalkan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif dan KH. Hasyim Muzadi, dan kemudian dirangkai dalam pemikiran keilmiah oleh Masdar Hilmy melihat gerakan politik Hizbut Tahrir Indonesia, melalui paradigma teori yang sama dengan Peter Mandaville. (Lihat: Masdar Hilmy, "Akar-Akar Transnasional Hizbut Tahrir Indonesia" dalam *Jurnal Islamica*, Vol 6 No 1 Tahun 2011, h.3)

¹² Azyumardi Azra, "Kontestasi Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer" dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol 23 No 1 Tahun 2016, 175.



JALAN KELUAR DARI POLITIK IDENTITAS

Disaat upaya menyelesaikan tulisan ini, penulis juga melihat beberapa tawaran konseptual sebagai jalan keluar dari tampilan politik identitas ini, khususnya dari mereka yang gelisah dan khawatir strategi politik identitas terus menerus digunakan sebagai tirani mayoritas terhadap kelompok mayoritas. Misalnya, Masdar Hilmy dalam harian Kompas memberikan usulan sebagaimana berikut:

“Lantas, bagaimana mengelola politik identitas di tengah kontruksi negara “bukan-bukan” *pertama*, setiap elite politik hendaknya memiliki tingkat kecerdasan, sensitivitas, dan sensibilitas budaya terhadap berbagai isu sosial-politik yang melingkupinya. Sensitivitas dan sensibilitas budaya dimaksud termanifestasi dalam bentuk tutur kata untuk menghindari pilihan kata, diksi, atau kalimat yang dapat melukai perasaan sekelompok orang. Seseorang pemimpin yang bijak semestinya dapat mendayagunakan kecerdasannya dalam memfilter, memilih dan memilah ujaran-ujaran yang dapat mengayomi seluruh warganya. *Kedua*, di tingkat akar rumput, masyarakat kita harus diedukasi secara terus-menerus dalam rangka memperkuat rasionalitas publik mereka. Termasuk dalam konteks ini adalah mengedukasi agar mereka tidak memiliki “sumbu pendek” dalam merespons setiap isu sensitive (SARA) di ruang publik. Harus diakui, cepatnya penyebaran berbagai bentuk hoaks di ruang publik yang kita miliki. *Ketiga*, semua elemen bangsa – utamanya aktor-aktor politik dan negara – harus mengambil peran aktif-partisipatif dalam menguraikan “narasi tebal” politik yang melampaui sekat-sekat primordialitas seseorang. Setiap dari kita harus senantiasa diingatkan konsep dan praktik politik kita harus melampaui “narasi tipis” politik identitas.”¹³

Dalam bahasa sederhana penulis, gagasan Masdar Hilmy ini menginginkan sebuah politik berkeadaban (berperadaban). Sebuah model politik yang mempertimbangkan aspek-aspek substantif di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sekedar berfikir jangka pendek demi menggalang sebuah kekuasaan dan pengaruh terhadap orang lain. Politik berkeadaban tentunya harus didukung oleh masyarakat yang juga civilized melalui dunia pendidikan. Mereka harus bisa membedakan mana ruang politik, kehidupan sosial-kemasyarakatan yang membutuhkan pola hubungan harmonis antar sesama, dan mana kepentingan agama yang substantif yang wajib dihadirkan di dalam kehidupan masyarakat.

Menambahi apa yang disampaikan Masdar Hilmy di atas, serta melihat dinamika interaksional yang ada di lingkungan masyarakat. Penulis ingin mengajukan sebuah konsep bernama ‘politik hikmah’. Sebuah narasi tebal politik yang penulis ambil dari saripati politi-profetik, para wali dan penyebar Islam di Indonesia, dan para penggagas keislaman-keislaman moderat dan pribumi. Politik hikmah yang penulis maksudkan juga bisa bermakna sebagai politik multi-kulturalisme dan kemanusiaan. Politik madinah yang menjaga relasi atau hubungan baik antara muslim dan non-muslim di era kenabian. Politik yang tampil untuk membela masyarakat tanpa mempertimbangkan asal muasal manusia itu berasal. Hal inilah yang terlihat.

¹³ Masdar Hilmy “Mengelola Politik Identitas” pada harian Kompas Tanggal 23 Nopember 2017



JALAN KELUAR DARI POLITIK IDENTITAS
Atmari-STAI al Azhar Menganti



23 – 24 NOPEMBER 2019
UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya Suites Hotel
Jl. A. Yani 117 Surabaya Jl. Pemuda 33 – 37 Surabaya

Halaman
341

PENUTUP

Pada kesimpulannya; *pertama*, politik identitas – dalam bentuk apapun – akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat. Positif, apabila keberpihakan kuasa itu pada nilai-nilai hasil consensus bersama pada bentuk masyarakat plural (*unity in diversity*). Seperti keberpihakan Joko Widodo terhadap kelompok Islam toleran, moderat, dan progresif pada kontestasi Islamisme di ruang publik beberapa bulan terakhir. Negatif, apabila politik identitas digunakan untuk strategi kontestasi politik semata untuk meraup suara mayoritas, dibawah baying mayoritas. Maka dari itu, semestinya, kontestasi politik yang ideal seharusnya menghadirkan diskursus program bukan kembali pada sintemen agama, ras, suku, dan budaya yang ada di Indonesia.

Kedua, melalui pendekatan cultural untuk memahami dinamika lokal, maka akan dihasilkan sebuah kebijakan yang berasaskan kebijaksanaan (*hikmah al siyasi*). Sebuah model politik para Nabi yang menghibahkan hidupnya untuk masyarakat majmuk. Model politik yang tidak menggaris antara pribumi dan pendatang. Model politik yang menciptakan aturan di atas semua elemen yang ada. Hal ini pulalah, yang harus dilakukan semua pihak untuk menghadapi keragaman di Indonesia ini. Tidak boleh ada agama yang memaksakan kehendaknya untuk menjalankan aturan agama tertentu, karena di Indonesia tidak hanya ada satu agama. Di Indonesia banyak agama pada teritori yang juga sangat jauh berbeda kondisi keberadabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, Jakarta; Democracy Project, 2012
- J. D. Esposito, *the future of Islam*, New York, Routledge, 2009
- Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam in Indonesia; Contrasting Image and Interpretations* Amsterdam; Amsterdam University Press, 2013
- Jonathan Freidman “The Past in The Future; istory and Politics of Identity” dalam *Journal of American Anthropologist* Vol 94 Issue 4 Tahun 1992
- Husniyatus Salamah “Politic of Cirizenship; Shape of identities, education and critical media literacy” Paper Seminar Internasional Pendidikan Islam di UM Malang Pada Desember 2016
- Din Wahid “Kembalinya Konservatisme Islam Indonesia” dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol 21 No 2 Tahun 2014
- Peter Mandaville, *Transnational Muslim Politics; Re-Imaging The Umma* London: Routledge, 2001
- Masdar Hilmy, “Akar-Akar Transnasional Hizbut Tahrir Indonesia” dalam *Jurnal Islamica*, Vol 6 No 1 Tahun 2011
- Azyumardi Azra, “Kontestasi Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer” dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies* Vol 23 No 1 Tahun 2016

